



Available online at [journal.unhas.ac.id/index.php/HJS](http://journal.unhas.ac.id/index.php/HJS)

# HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)

Volume 4, Issue 1, 2022

P-ISSN: 2685-5348, E-ISSN: 2685-4333

## Ketimpangan Sosial dan Bencana: Suatu Analisis Sosiologis terhadap Dampak Bencana Berbasis Kelas Sosial

*Social Inequality And Disaster: A Sociological Analysis of The Impact of Social Class-Based Disasters*

Evi Diana Sari<sup>1</sup>, Baiq Lily Handayani<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Sosiologi Universitas Jember, Indonesia, Email: [evidiandians10@gmail.com](mailto:evidiandians10@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Sosiologi Universitas Jember, Indonesia, Email: [baiq.fisip@unej.ac.id](mailto:baiq.fisip@unej.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### **How to Cite:**

Sari, E. D., & Handayani, B. L. (2022). Ketimpangan Sosial dan Bencana: Suatu Analisis Sosiologis terhadap Dampak Bencana Berbasis Kelas Sosial. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 4(1), 9-21.

#### **Keywords:**

*Social inequality, disaster impact, social class, society*

#### **Kata Kunci :**

*Ketimpangan sosial, dampak bencana, kelas sosial, masyarakat*

### ABSTRACT

*This paper focuses on the social inequalities of catastrophic societies that occur due to social class differences. Upper class people have a lot of access to disaster relief from the government so that social jealousy arises in the lower class who feel injustice because of uneven assistance from the government that even encountered cases of disaster relief corruption. The impact of disasters is so great that in this case the government must be serious in addressing this problem of social inequality so that there is no conflict in disaster communities. This condition if not immediately overcome by the government can prevent the community to recover from the disaster. This phenomenon is analyzed through social class theory and conflict theory to describe the conditions of inequality of catastrophic societies. Based on analysis conducted by previous researchers found that there are social class differences that have the potential for conflict in disaster communities. This research method uses review literature obtained from previous books, articles or journals. The purpose of this writing is to explain how social inequality can occur in disaster societies.*

### ABSTRAK

Tulisan ini berfokus pada ketimpangan sosial masyarakat

bencana yang terjadi karena perbedaan kelas sosial. Masyarakat kelas atas memiliki banyak akses terhadap bantuan bencana dari pemerintah sehingga muncul kecemburuan sosial pada masyarakat kelas bawah yang merasakan ketidakadilan karena tidak meratanya bantuan dari pemerintah yang bahkan ditemui adanya kasus korupsi bantuan bencana. Dampak yang diperoleh dari bencana sangatlah besar sehingga dalam hal ini pemerintah harus bersikap serius dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial ini agar tidak terjadi konflik pada masyarakat bencana. Kondisi tersebut apabila tidak segera diatasi oleh pemerintah dapat menghambat masyarakat untuk pulih dari bencana. Fenomena ini dianalisis melalui teori kelas sosial dan teori konflik untuk mendeskripsikan kondisi ketimpangan masyarakat bencana. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ditemukan bahwa ada perbedaan kelas sosial yang berpotensi terjadinya konflik pada masyarakat bencana. Metode penelitian ini menggunakan literatur review yang diperoleh dari buku, artikel atau jurnal terdahulu. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bagaimana ketimpangan sosial dapat terjadi pada masyarakat bencana.

---

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang memiliki kondisi geografis yang berpotensi terjadi bencana. Kondisi yang rawan tersebut terjadi karena Indonesia berada pada tiga lempeng aktif terbesar di dunia, yakni Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Eurasia. Bencana yang sering terjadi pada wilayah Indonesia adalah gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, gelombang tsunami, dan banjir. Bencana alam mengakibatkan banyak kerugian seperti hilangnya harta benda, rusaknya lingkungan, dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Masyarakat yang terdampak bencana akan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat berupa akses kesehatan, sandang, pangan dan papan. Namun dalam hal ini pengalokasiannya masih belum maksimal sehingga memicu terjadinya ketimpangan sosial.

Ketimpangan sosial pada masyarakat bencana dapat terjadi karena masyarakat kelas atas memiliki banyak akses pada aspek sosial ekonomi dan terbalik dengan kondisi masyarakat kelas bawah yang hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja. Dalam hal ini masyarakat kelas atas diantaranya aparat pemerintahan, pengusaha, dan lain-lain berpengaruh besar terhadap pemulihan masyarakat kelas bawah. Apabila masyarakat kelas atas tidak bertanggung jawab atas

tugasnya dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, maka dapat berakibat pada penderitaan yang dialami masyarakat kelas bawah.

Kapitalisme bencana juga hadir dalam masyarakat yang terdampak bencana, karena perbedaan kelas sosial dapat digunakan oleh masyarakat kelas atas untuk membuka peluang usaha di atas penderitaan para korban bencana. Kapitalis tersebut memanfaatkan kondisi masyarakat dengan melakukan tindakan tidak terpuji dan mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk memperkaya dirinya dengan kekuasaan yang dimilikinya. Praktik Kapitalisme bencana dapat ditemui diberbagai kesempatan seperti memanfaatkan bantuan bencana yang diberikan kepada korban yang mana bukan hak nya.

Selanjutnya pada praktik kapitalisme bencana, masih ditemui adanya ketidakmerataan bantuan yang akan diterima oleh masyarakat bencana sehingga bisa dikatakan ada kasus korupsi bantuan bencana dalam distribusi bantuan tersebut. Hal ini sangat beresiko dan berpotensi terjadinya konflik diantara keduanya. Permasalahan ketimpangan sosial sudah seharusnya diatasi secara serius oleh pemerintah agar tidak menambah beban penderitaan bagi masyarakat bencana, sehingga diperlukan adanya upaya penanggulangan khusus dari pemerintah serta kerja sama antara masyarakat untuk mencegah permasalahan yang terjadi.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi literatur review yang sesuai dengan topik penelitian. Literature review adalah suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan sebuah topik ketimpangan sosial masyarakat bencana yang terjadi karena perbedaan kelas sosial yang saat ini sedang diteliti dan dianalisis menggunakan teori sosiologis yang bertujuan untuk menambah pengetahuan pembaca dalam memahami fenomena yang sedang terjadi dalam masyarakat bencana.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **• Sosiologi Memandang Bencana**

Sosiologi memandang bencana sebagai persepsi manusia atau masyarakat terkait apa yang mereka rasakan terhadap pengalaman emosional atas sebuah kejadian yang mengancam kehidupan mereka. Sjoberg (1962) berupaya untuk menganalisa dan mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai bencana dan pemahaman

pola kehidupan masyarakat di masa lalu yang seharusnya tidak terabaikan. Studi Sjoberg (1926; 338) mengenai bencana telah difokuskan kepada perilaku atau kelompok yang merasakan keadaan tertekan (Pramono, 2016). Menurut Oliver-Smith (1999; 163) bencana adalah masa dimana seseorang atau masyarakat mengalami perasaan emosi seperti kecemasan, kesedihan, bersyukur, ketakutan, kehilangan, frustrasi, pasrah menjadi satu kesatuan yang dirasakan. Sedangkan Birkland (1996) menjelaskan bahwa bencana yang terjadi pada masyarakat adalah suatu hal yang mengerikan. Peristiwa atau bahaya yang berpotensi terjadi bencana (hazards) adalah suatu fenomena yang penting untuk dipelajari dalam sebuah analisis bencana (Britton, 1987). Hal ini terjadi karena semua bencana menimbulkan adanya resiko bencana. Penjelasan mengenai bencana sebagai kejadian yang non periodik terjadi di tengah kehidupan masyarakat pada subsistem yang lebih besar yang dapat menimbulkan kerusakan fisik dan gangguan sosial (Kreps, 1995). Pendekatan sosiologis telah mendiskusikan kerentanan dan dampak bencana yang terjadi pada perilaku manusia dan berpengaruh terhadap fungsi organisasi dan masyarakat (Drabek; 1986). Peristiwa bencana menimbulkan sebuah pertanyaan terhadap para ahli sosiologis yaitu “bagaimana manusia dan kelompok manusia berpendapat dan beranggapan atas terjadinya peristiwa bencana?” studi sosiologi mengenai bencana dimulai oleh seorang tokoh yang bernama Prince’s (1920) yang menjelaskan mengenai tabrakan dua kapal pada tanggal 6 Desember 1917 yang terjadi di Pelabuhan Halifax. Peristiwa tersebut yang menjadi kunci adanya sebuah riset mengenai sosiologi bencana. Secara epistemologis, semua kejadian bencana adalah sebuah peristiwa sejarah yang unik. Sebuah analisis kooperatif (Kreps 1984; Drabek 1986) merumuskan pola perilaku unit sosial dan individu dari keluarga, organisasi dan komunitas.

Bencana telah menjadi sebuah realitas sosial yang semua orang dapat temui. Bencana membawa kerusakan material dan non material pada kehidupan manusia. Pada tahun 2000 hingga 2011 ditemui bahwa Indonesia memiliki peningkatan bencana hidrometeorologi berupa bencana angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor dan tepat pada bulan Januari tahun 2013 terjadi 120 bencana di Indonesia yang mengakibatkan 123 korban jiwa meninggal dunia, 179.659 orang menderita dan mengungsi, 940 rumah rusak berat, 2.717 rumah rusak sedang, 10.798 rumah rusak ringan, dan fasilitas umum yang lainnya juga mengalami kerusakan yang cukup parah (Soulisa, 2019). Menurut (Pratiwi, 2018) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa bencana tanah

longsor terjadi di Desa Sampang Banjarmasin pada tahun 2014 yang menunjukkan bencana tanah longsor mengakibatkan kerusakan yang cukup parah terhadap rumah warga sehingga harus dialokasikan ke tempat pengungsian. Dampak dari bencana tanah longsor di Banjarmasin tidak sebanding dengan banjir yang terjadi di kawasan Wae Ela di Negeri Hena Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah pada 25 Juli tahun 2013 yang mengakibatkan sebanyak 420 rumah warga rusak total dan fasilitas umum lainnya rusak parah. Banjir tersebut juga mengakibatkan 1.027 kepala keluarga atau sebanyak 5.227 korban banjir harus terpaksa mengungsi ke tempat pengungsian darurat yang disediakan oleh pemerintah (Soulisa, 2019).

Hasil penelitian sejarah (Muhamad et al., 2017) menyebutkan dampak bencana banjir juga terjadi pertama kali di Kabupaten Bandung pada tahun 1986 yang menggenangi sebanyak 10 desa dan kecamatan. Dampak dari adanya banjir tersebut mengakibatkan sebanyak 68.635 korban bencana menderita, 38.672 mengungsi, dan 5 orang diantaranya meninggal dunia. Pada wilayah Aceh juga ditemui adanya bencana. Bencana tersebut adalah tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam. Bencana tsunami di Aceh masih menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Hal ini karena tsunami tersebut mengakibatkan hampir 127.000, 30.000 orang hilang dan kurang lebih 500.000 ribu orang terpaksa harus berpindah tempat dari rumah asalnya (Soulisa, 2019). Peristiwa bencana memang membawa dampak yang menyedihkan bagi masyarakat bencana. Masyarakat bencana tidak memerlukan waktu yang singkat untuk dapat pulih dari bencana yang menimpanya. Dukungan dari pemerintah dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan pada saat bencana menimpa mereka. Bencana sudah menjadi sebuah realita sosial yang siapa saja dapat jumpai.

- **Kelas Sosial Masyarakat Bencana.**

Kelas Sosial adalah lapisan masyarakat yang memiliki kesamaan kedudukan dalam satu status sosial. Setiap masyarakat memiliki kelas sosial didalamnya. Hubungan kelas sosial pada masyarakat muncul karena adanya kelas-kelas yang saling berhubungan yang disebut sebagai sistem sosial. Setiap anggota didalam masyarakat memiliki kedudukan dan memiliki kesadaran. Hal tersebut diakui oleh seluruh anggota masyarakat pada umumnya. Max Weber menjelaskan bahwa strata kelas sosial dalam anggota masyarakat ini terbentuk karena aspek ekonomi. Kekayaan menjadi ukuran yang membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang memiliki kekayaan melimpah dan berkecukupan masuk ke dalam masyarakat golongan kelas atas. Dan sebaliknya masyarakat yang berkehidupan pas-pas an dan kekurangan

maka termasuk ke golongan masyarakat kelas bawah. Sebuah hukum yang membagi masyarakat dari status sosialnya karena peningkatan kesadaran untuk hidup yang lebih baik dan layak. Hubungan kualitas manusia berhubungan dengan kapasitas sebuah mental, kemampuan dan lain-lain yang dimiliki. (Stallings, 1991) menjelaskan bahwa dampak dari adanya bencana yang dialami masyarakat akan berbeda-beda menurut kelas sosialnya.

Max dan Weber telah memberikan sebuah kerangka berfikir yaitu membagi kelas sosial menjadi tiga bagian. Bagian tersebut yaitu kelas bawah (lower class), kelas menengah (middle class), dan kelas atas (upper class). Hal ini digambarkan dengan kurva berbentuk segitiga. Namun pada penelitian ini hanya menggunakan kelas sosial bawah (lower class) dan kelas sosial atas (upper class) dalam menganalisis masyarakat bencana (Ansori, 2020). Kelas sosial dapat terbentuk berdasarkan kontrol terhadap alat, kontrol terhadap manusia dan kepemilikan terhadap alat (Kohn et al., 1990). Karl Marx menjelaskan bahwa sistem kepemilikan pribadi yang dimiliki kelas atas memang menjadi penyebab terbentuknya kelas sosial. Rekonstruksi bencana hadir sebagai pembangunan kembali prasarana, sarana dan kelembagaan terhadap wilayah pascabencana. Adanya rekonstruksi bencana juga rawan terjadinya ketimpangan sosial. Pemerintah dan masyarakat menjadi sasaran utama tumbuhnya kegiatan sosial, ekonomi, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya masyarakat bencana dari aspek sosial dan ekonomi. Hal ini otomatis juga berlaku pada masyarakat bencana. Masyarakat bencana juga memiliki kedudukan yang berbeda-beda sesuai dengan kelas sosialnya. Masyarakat kelas atas memiliki kekayaan yang melimpah dan memiliki banyak akses bantuan bencana dan sebaliknya masyarakat kelas bawah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini masyarakat kelas atas bertugas untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas atas ini diantaranya aparat pemerintah, pejabat dan lain-lain yang memiliki kekayaan atau kekuasaan. Sedangkan masyarakat kelas bawah mereka yang menerima bantuan tersebut.

- **Ketimpangan Sosial Masyarakat Bencana**

Dewasa ini ketimpangan sosial dirasakan oleh masyarakat bencana. masyarakat bencana akan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat. Bantuan bencana tersebut berupa sandang, pangan, papan dan akses pendidikan. Namun bantuan yang diberikan oleh pemerintah pengalokasiannya belum maksimal karena masih ditemui penyaluran bantuan yang tidak merata

atau salah sasaran sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial di masyarakat bencana. Hal tersebut yang membuat (Dyer & McGoodwin, 1994) mengatakan bahwa pemerintah masih kurang memahami masyarakat pada bagian tertentu yang menyebabkan kurangnya kepedulian dan tidak peka terhadap kondisi masyarakat dalam menghadapi bencana yang terjadi. Ketimpangan sosial dapat dipahami sebagai ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat akibat perbedaan kelas sosial, ekonomi, dan budaya.

Ketimpangan sosial ini sudah seharusnya ditangani secara serius oleh pemerintah karena berpotensi terjadinya konflik pada masyarakat bencana. Kelas sosial dapat terbentuk berdasarkan kontrol terhadap alat, kontrol terhadap manusia dan kepemilikan terhadap alat (Kohn et al., 1990). Karl Marx menjelaskan bahwa sistem kepemilikan pribadi yang dimiliki kelas atas memang menjadi penyebab terbentuknya kelas sosial. Rekonstruksi bencana hadir sebagai pembangunan kembali prasarana, sarana dan kelembagaan terhadap wilayah pascabencana. Adanya rekonstruksi bencana juga rawan terjadinya ketimpangan sosial. Pemerintah dan masyarakat menjadi sasaran utama tumbuhnya kegiatan sosial, ekonomi, budaya, tegaknya hukum, dan ketertiban serta bangkitnya masyarakat bencana dari aspek sosial dan ekonomi. Tetapi dalam hal ini muncul sebuah kapitalisme bencana sebagai peluang usaha masyarakat kelas atas. Dalam buku *The Rise Of Disaster Capitalism* karya Naomi Klein menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai rekonstruksi, yaitu apakah rekonstruksi pasca bencana menjadikan munculnya kapitalisme? Menurutnya kapitalisme bencana diartikan sebagai sebuah perubahan sosial ekonomi yang terjadi secara radikal dan dipandu oleh rezim pasar yang memanfaatkan penderitaan dan ketakutan bagi korban bencana (Klein, 2007).

Kapitalisme merupakan faktor utama yang menyebabkan ketimpangan sosial terjadi, selain itu dalam kapitalisme menjadi bukti adanya jurang pemisah antara kelas sosial atas dan kelas sosial bawah. Kapitalisme menjadi sebuah isu global yang tercipta karena keserakahan kekuasaan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh kelas atas. Kapitalisme bencana juga terjadi pada masyarakat Aceh yang dibuktikan dengan pengabaian pembangunan ekonomi rakyat kecil, pengerjaan yang lambat dan mahal nya jasa konsultan asing yang harus dibayar dan perilaku korupsi (Juhaina et al., 2019). Masyarakat terdampak bencana berpotensi terjadi konflik karena ketimpangan sosial yang dirasakan. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari organisasi berdasarkan kekuasaannya (Rosana, 2015).

Ketimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat bencana berpotensi terjadinya konflik apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi oleh pemerintah. Menurut Lewis A. Coser konflik merupakan perjuangan yang terjadi karena adanya tuntutan kekuasaan, status atau kedudukan sosial dan sumber daya yang dinilai langka dan mempunyai maksud untuk menetralkan atau mencederai (Rosana, 2015). Masyarakat kelas atas yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya membantu masyarakat bencana juga dapat terjadi karena tuntutan kekuasaannya. Mereka menganggap bantuan pemerintah tersebut adalah suatu hal yang langka, sehingga dijadikan sebuah peluang usaha yang akibatnya timbulnya sebuah ketimpangan sosial di masyarakat bencana.

Teori konflik Modern juga menjelaskan bahwa masyarakat adalah sistem evolusi yang dalam hal ini mengalami persaingan yang dilakukan untuk kepentingan ekonomi dan dikontrol oleh kelompok kelas atas atau elite yang mendominasinya (Rosana, 2015). Masyarakat kelas atas dalam bencana memang memiliki akses bantuan yang sangat tinggi karena kekuasaan yang dimilikinya, berbeda dengan masyarakat kelas bawah. Konflik juga lahir karena munculnya berbagai persepsi negatif dari masyarakat terutama masyarakat kelas bawah yang sering merasakan ketidakadilan. Biasanya masyarakat saling mencurigai yang menyebabkan terjadinya krisis relasi sosial, seperti contoh masyarakat kelas bawah yang terus-menerus mencurigai masyarakat kelas atas melakukan tindak korupsi.

Permasalahan tersebut jika terus diabaikan dapat menyebabkan terjadinya konflik horizontal antar individu, kelompok dan golongan. Konflik dapat terjadi karena sebuah kecemburuan sosial. Kecemburuan inilah yang akan menyebabkan konflik di masyarakat bencana. Masyarakat kelas bawah akan merasa cemburu jika masyarakat kelas atas memiliki banyak akses untuk mendapatkan bantuan. Kecemburuan tersebut dapat meledak kapan saja apabila masyarakat kelas bawah mengetahui bahwa akses yang dimiliki kelas bawah dimanfaatkan untuk peluang usaha dan tidak menjalankan tugas yang diamanahkan oleh pemerintah, karena masyarakat kelas atas langsung mendapatkan akses dari pemerintah.

Akses bantuan tersebut disalurkan oleh masyarakat kelas atas yang diamanahi oleh pemerintah. Pemerintahlah yang menganggarkan adanya dana APBN dan APBD khusus untuk masyarakat bencana. Dana tersebut adalah unsur yang paling penting yang dibutuhkan oleh

masyarakat bencana. Uang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan saat bencana terjadi. Namun pemerintah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab terkadang tidak mencerminkan sikap tersebut karena masih ditemui bantuan yang tidak sampai atau salah sasaran dan bahkan ditemui kasus korupsi (Rahman et al., 2020). Terbukti dengan adanya oknum pemerintah yang terjerat kasus korupsi pasca bencana alam gempa bumi yang terjadi di pulau lombok yang dilakukan oleh Haji Muhrir yang merupakan anggota DPRD Kota Mataram (Rosikhu & Rahmatulloh, 2021).

Korupsi bencana dapat dipidanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan dana bencana. Menurut Pasal Undang-Undang Tipikor pada ayat (1) mengenai tindak pidana korupsi berbunyi “setiap orang yang secara langsung melakukan perlawanan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau karena suatu korporasi yang merugikan perekonomian dan keuangan negara, dapat dipidanakan dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama selama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp 200 juta (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 1 miliar (satu miliar rupiah)” dan Ayat (2) berbunyi “Dalam hal mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana sudah disebutkan dalam ayat (1) yang dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhkan pidana mati” (Rosikhu & Rahmatulloh, 2021).

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi ketimpangan sosial masyarakat bencana yang terjadi karena perbedaan kelas sosial adalah dengan adanya kepedulian dan keseriusan pemerintah dalam mengatasi bencana yang terjadi dan bentuk-bentuk kerja sama masyarakat untuk pulih dari bencana. Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni:

1. Pemerintah dapat memprioritaskan kebutuhan akses kesehatan, sandang, pangan dan papan atau pengungsian yang layak terutama pada masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki akses yang luas seperti masyarakat kelas atas. Pemerintah juga harus melakukan survei dan mendata masyarakat yang harus diberikan bantuan terlebih dahulu dilihat dari kondisi seberapa parah masyarakat tersebut terdampak bencana. Bantuan tersebut harus dilakukan secara adil dan merata.
2. Pemerintah memberikan perlindungan khusus untuk masyarakat kelas bawah sehingga apabila ditemui masyarakat kelas atas yang tidak bertanggung jawab dalam tugasnya memberikan bantuan kepada masyarakat kelas bawah dapat diatasi secara tegas atau melalui jalur hukum.

3. Pemerintah memberikan perhatian dan kepedulian secara khusus kepada masyarakat yang rawan bencana, karena masyarakat yang rawan bencana memiliki ancaman yang berbahaya apabila bencana datang menghampiri mereka.
4. Pemerintah harus memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan mengenai cara menghadapi risiko bencana dan cara penanggulangannya. Hal tersebut dilakukan untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana dan resiko yang akan diterima.
5. Pemerintah melakukan segala rencana pemulihan dengan memfasilitasi berbagai proses pemulihan sosial ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat bencana tanpa menciptakan kerentanan yang baru pada masyarakat bencana.
6. Pemerintah bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang menjadikan bencana sebagai peluang usaha (kapitalisme)

Upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi dan mencegah adanya ketimpangan sosial karena perbedaan kelas sosial, agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat:

1. Masyarakat harus memperkuat modal sosial didalam masyarakat bencana sehingga masyarakat dapat saling mempercayai, bergotong royong dan bekerja sama dalam menghadapi bencana.
2. Masyarakat menciptakan hubungan sosial dari norma-norma sehingga dapat membentuk kualitas hubungan sosial yang baik antara seluruh masyarakat sehingga akan menjadi perekat yang kuat dan harmonis.
3. Masyarakat mampu meningkatkan kesadaran sosial bersama-sama untuk menjaga kondisi bersama agar tetap aman saat menghadapi berbagai ancaman bencana.
4. Masyarakat dalam bencana tidak membedakan antara kelas bawah dan kelas atas dalam penerimaan bantuan dari pemerintah. Masyarakat kelas atas harus bersikap adil jika diberi amanah untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat bencana. Sehingga tidak ada perbedaan yang menimbulkan ketimpangan diantara keduanya.
5. Masyarakat harus patuh terhadap himbauan pemerintah dalam penyelamatan saat terjadi bencana, sehingga tidak akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

6. Masyarakat tidak memanfaatkan bencana sebagai peluang usaha (kapitalisme) tetapi berfokus terhadap keselamatan bersama dan kepentingan bersama.

#### 4. KESIMPULAN

Ketimpangan sosial menjadi sebuah realita sosial pada masyarakat bencana. Hal ini dapat terlihat pada perbedaan bantuan bencana yang diterima oleh masyarakat bencana. Masyarakat kelas atas memiliki kekayaan dan akses yang melimpah dan berbanding terbalik dengan masyarakat kelas bawah yang mengandalkan bantuan dari pemerintah. Masyarakat kelas bawah mengalami ketidakadilan, karena memiliki perbedaan akses. Penyaluran bantuan oleh pemerintahan harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan berkeadilan baik pada masyarakat kelas atas maupun kelas bawah. Tetapi hal ini masih ditemui adanya kasus korupsi sehingga menimbulkan tidak meratanya bantuan bencana yang menjadi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial harus diatasi secara serius oleh pemerintah agar tidak timbul kecemburuan sosial di masyarakat. Dalam kondisi ketimpangan sosial masyarakat bencana pemerintah sudah seleyaknya dapat memprioritaskan sesuai kebutuhan dan masyarakat harus mampu berkolaborasi guna mengatasi dan mencegah permasalahan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, F., Rohmah, H. Z., Prabawa, I. K., & Dewi, D. A. K. (2020). *Monograf Korupsi Dana Bencana di Indonesia*. Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
- Muhamad, R. A. T., Sekarningrum, B., & Agha, Y. M. (2017). Modal Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Banjir (Kasus Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat). *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(2), 101–114.
- Fadilah, G. (2021). Implikasi Teori-teori Konflik terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi. *Journal of Society and Development*, 1(1), 11–15.
- Pramono, R. (2016). Perspektif Sosiologis Dalam Penanggulangan Bencana Sociological Perspectives in Disaster Management. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(1), 81–96.
- Pratiwi, P. R. (2018). *Komunikasi Bencana Dan Budaya Lokal (Studi Kasus Model Komunikasi Bencana dalam Bencana Tanah Longsor di Desa Sampang Banjarnegara Tahun 2014)*.
- Sabir, A., & Phil, M. (2016). Gambaran Umum persepsi masyarakat terhadap bencana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 5(3), 304–326.

- Wimbardana, R., Sagala, S., Wijayanti, A. R., & Pratama, A. A. (2014). Integrasi Rehabilitasi Sosio-Ekonomi Penduduk Setelah Gunung Merapi Tahun 2010 terhadap Perencanaan Pemulihan. *Bandung: Resilience Development Initiative (RDI)*.
- Rosikhu, M., & Rahmatulloh, J. (2021). Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam. *Jurnal Legalitas*, 14(01), 41–52.
- Yuliyanto, A. (2016). *Strategi Adaptasi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana (Studi Kasus Masyarakat Kampung Trangkil Baru Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Pasca Bencana Alam Tanah Longsor Tahun 2014)*. Universitas Negeri Semarang.
- Ansori, M. H. (2020). Wabah COVID-19 dan kelas sosial di Indonesia. *THC Insights*, 14/06.
- Juhaina, J., Fasya, T. K., & Kamil, A. I. (2019). Problematika Di Balik Proses Relokasi Korban Bencana Di Siti Ambia. *Aceh Anthropological Journal*, 3(1), 86–101.
- Herimanto, H., Budiati, A. C., & Utami, T. (2013). Ecoliteracy Masyarakat Rawan Bencana melalui Mitos Prabu Boko di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. *Forum Ilmu Sosial*, 40(2).
- Soulisa, M. S. (2019). Perubahan Sosial Masyarakat Negeri Hena Lima Pasca Bencana Banjir Wae Ela Di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *Dialektika*, 12(1), 57–70.
- Rosana, E. (2015). Konflik pada kehidupan masyarakat (Telaah mengenai teori dan penyelesaian konflik pada masyarakat modern). *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(2), 216–230.
- Dyer, C. L., & McGoodwin, J. R. (1994). *Folk management in the world's fisheries. Lessons for modern fisheries management*.
- Wibowo, A. (2020). Potensi Ancaman Bencana Sulsel dan Solusinya. In *Potensi Ancaman Bencana Sulsel dan Solusinya* (hal. 1). BNPB. <https://bnpb.go.id/berita/potensi-ancaman-bencana-sulsel-dan-solusinya>
- Hanavia, E. (2013). Kajian Penerapan Hukuman Terhadap Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 2(2).
- Stallings, R. A. (1991). Disasters as social problems? A dissenting view. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, 9(1), 69–74.
- Drabek, T. E. (2012). *Human system responses to disaster: An inventory of sociological findings*. Springer Science & Business Media.

Kohn, M. L., Naoi, A., Schoenbach, C., Schooler, C., & Slomczynski, K. M. (1990). Position in the class structure and psychological functioning in the United States, Japan, and Poland. *American Journal of Sociology*, 95(4), 964–1008.

Klein, N. (2007). Disaster capitalism. *Harper's Magazine*, 315, 47–58.

Basid, A., Zulhizawati, Z., & Hamzah, M. (2018). Pertentangan kelas sosial pada tokoh utama dalam drama *The Heirs* berdasarkan perspektif teori sastra Marxis. *Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 4(2), 119–127.